

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan penyediaan air bersih di Indonesia selama ini mengacu Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konstitusi ini juga menunjukkan dan merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya. Penjaminan atas konstitusi itu lebih lanjut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Pembangunan saluran irigasi untuk menunjang penyediaan bahan pangan nasional sangat diperlukan, Meskipun negara ini jauh dari sumber air permukaan (sungai), pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pasokan pangan negara sangat diperlukan untuk memenuhi ketersediaan air negara. Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 tentang pangan yang mengatakan bahwa Mewujudkan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat, (Partowijoto, 2003).

Dalam pengelolaannya, jaringan irigasi memerlukan kegiatan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemeliharaan jaringan irigasi bertujuan untuk menjaga kondisi fisik dan fungsi jaringan agar tetap sesuai dengan rencana. Kegiatan pemeliharaan meliputi pembersihan saluran, perbaikan kerusakan, pengendalian sedimentasi, serta inspeksi berkala terhadap kondisi jaringan. Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan terencana akan mampu memperpanjang umur layanan jaringan irigasi serta menjaga kinerja sistem tetap optimal (Kementerian PUPR, 2015).

Dalam praktiknya, kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tidak selalu berjalan secara optimal. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi antara lain sedimentasi,

kerusakan fisik saluran, serta gangguan distribusi air. Sedimentasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan irigasi karena dapat mengurangi kapasitas saluran (Morris & Fan, 1998). Selain itu, kerusakan fisik saluran juga dapat mempengaruhi kelancaran distribusi air dalam sistem irigasi (Chow, 1988).

Dalam kegiatan pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, terdapat berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, baik dari aspek teknis, lingkungan, maupun manajerial (Project Management Institute, 2017). Risiko tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada menurunnya kinerja jaringan irigasi.

Selain aspek risiko, pengawasan juga merupakan faktor penting dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan standar, spesifikasi teknis, serta prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi, pemerintah telah menetapkan pedoman melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, termasuk aspek pengawasan yang harus dilakukan agar sistem irigasi dapat berjalan secara optimal (Kementerian PUPR, 2015).

Di wilayah Cikunten II Kota Tasikmalaya, jaringan irigasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Sumber air pada daerah irigasi ini berasal dari Bendung Ciwulan yang berfungsi sebagai bangunan utama dalam penyediaan air irigasi. Sebagian besar lahan pertanian di wilayah tersebut bergantung pada sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan air. Berdasarkan informasi awal dari pihak terkait, diperoleh gambaran bahwa kondisi jaringan

irigasi secara umum telah berjalan dengan baik, mulai dari jaringan primer, sekunder, hingga tersier, serta distribusi air relatif lancar.

Namun demikian, berdasarkan informasi awal tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi terjadi di lapangan, khususnya berupa penumpukan sedimen pada bagian pintu sadap dan bangunan pembagi. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti tingginya curah hujan yang menyebabkan terbawanya material dari hulu sungai ke dalam saluran irigasi. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menghambat aliran air dan menurunkan kinerja jaringan irigasi.

Selain itu, berdasarkan informasi awal, kegiatan pemeliharaan dan pengawasan telah dilakukan, antara lain melalui peran Unit Pengelola Irigasi (UPI) yang bertugas dalam pengaturan, pengendalian, serta monitoring distribusi air. Namun, sejauh mana efektivitas pelaksanaan pengawasan dan kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR No.12/PRT/M/2015 belum diketahui secara pasti.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi serta mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Risiko dan Pengawasan pada Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Irigasi Berdasarkan PERMEN PUPR No.12/PRT/M/2015 di Cikunten II Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi aktual di lapangan serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas pemeliharaan dan pengawasan jaringan irigasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Analisis Pengawasan Pada Pemeliharaan Daerah Irigasi Berdasarkan Permen Pupr No.12/Prt/M/2015 Terhadap Risiko Penumpukan Sedimen Di Daerah Irgasi Cikunten Ii Kota Tasikmalaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menganalisis Pelaksanaan Pengawasan pada pemeliharaan Daerah Irigasi berdasarkan PERMEN PUPR No.12/PRT/M/2015 Serta Mengidentifikasi Potensi Risiko Penumpukan Sedimen di D.I Cikunten II Kota Tasikmalaya.

## **1.4 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Daerah irigasi di Cikunten II Kota Tasikmalaya.
2. Penelitian difokuskan pada pengawasan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi berdasarkan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015.
3. Pengawasan yang dikaji mengacu pada ketentuan dalam PERMEN PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
4. Potensi risiko yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada penumpukan sedimen yang ditemukan berdasarkan hasil observasi lapangan dan hubungannya terhadap pemerataan distribusi air di Daerah Irigasi Cikunten II.
5. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan.
6. Penelitian tidak membahas aspek biaya secara rinci, melainkan berfokus pada aspek risiko dan pengawasan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang teknik sipil, khususnya terkait dengan Analisis Pengawasan Pada Pemeliharaan Daerah Irigasi Berdasarkan Permen PUPR No.12/Prt/M/2015 Terhadap Risiko Penumpukan Sedimen Di Daerah Irigasi Cikunten II Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

Bagi instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pemeliharaan serta sistem pengawasan jaringan irigasi, khususnya pada daerah irigasi Cikunten II Kota Tasikmalaya.